

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU

Delly¹, Faizal Anwar¹, Novliza Eka Patrisia^{1*}

¹Prodi Administrasi Publik, FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu

*novlizaekap@umb.ac.id

ABSTRACT : *In welcoming the Wonderful of Bengkulu 2020 the city of Bengkulu continued to fix the existing tourism area, especially the Long Beach Tourism Village which is a tourist identity in Bengkulu. In the development of the Long Beach Pantai Panjang Tourism area continues to improve but the problems in its development policies, such as cleanliness and inadequate facilities. Through the thesis the problem raised is how is the implementation of tourism development policy in the Long Beach area of Bengkulu city and what are the inhibiting factors. Researchers used descriptive qualitative research methods. The results of this study explain the results of the implementation of tourism development policies in the Pantai Panjang area of Bengkulu city in the Bengkulu City Tourism Office. Cooperation with related agencies is always communicated by the Bengkulu City Tourism Office in the management of Panjang Beach so that Bengkulu in Realizing the Bengkulu 2020 Wonderful Program.*

Keywords: *Policy, Development, Tourism*

ABSTRAK : Dalam menyambut *Wonderfull* Bengkulu 2020 kota Bengkulu terus membenahi kawasan Pariwisata yang ada, terutama Kawasan Wisata Pantai Panjang yang merupakan identitas wisata yang ada di Bengkulu. Dalam pengembangan Pantai Panjang kawasan Wisata Pantai Panjang terus berbenah akan tetapi masalah-masalah dalam kebijakan pengembangannya, seperti masalah kebersihan dan fasilitas yang kurang memadai . Melalui skripsi permasalahan yang diangkat adalah Bagaimanakah implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu dan apa sajakah kendala kebijakan tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data penelitian ini meliputi reduksi data analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan hasil implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu di Dinas Pariwisata kota Bengkulu. Kerja sama dengan instansi terkait selalu dikomunikasikan oleh Dinas Pariwisata kota Bengkulu dalam pengelolaan Pantai Panjang agar Bengkulu dalam Mewujudkan Program *Wonderfull Bengkulu 2020*.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengembangan, Pariwisata

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang sangat indah dan kaya akan budaya. Semua itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai objek dan daya tarik wisata yang menarik kunjungan wisatawan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengatakan bahwa pembangunan Kepariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan nasional maupun lokal (Junaidi 2011: 2).

Untuk mendorong perkembangan pariwisata dalam otonomi daerah yang terdiri atas Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, yakni pengelolaan pariwisata dilakukan dengan partnership dari berbagai sector mampu meningkatkan ekonomi masyarakat daerah pantai (Darmi, T. 2017).

Kebijakan pembangunan pariwisata yang dijalankan pemerintah diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi memperluas lapangan kerja, dan kesempatan berusaha serta memelihara keberibadian bangsa, nilai-nilai agama serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup (Wardoyo 3003:40).

Kota Bengkulu memiliki banyak sekali tempat pariwisata yang bagus dan tidak kalah menarik dari kota lain. Kota Bengkulu memiliki salah satu sektor pariwisata yang luas, Salah satunya ialah wisata Pantai Panjang. Pantai panjang merupakan pantai yang berada di kota Bengkulu. Yang terletak disisi barat kota Bengkulu yang jaraknya dari pusat kota hanya lebih kurang 2 kilo meter. letaknya yang strategis dan tidak jauh dari pusat kota (Pratama 2015: 6).

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang kota Bengkulu telah disadarai oleh pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh gubernur Bengkulu, yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan mampu menyedot bukan

saja wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan nasional serta manca negara. (Santoso 2009: 2).

Kebijakan Penyelenggaraan kepariwisataan melalui peraturan daerah (perda) No 06 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan daerah kota Bengkulu pasal 5 tentang penyelenggaraan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melestarikan alam lingkungan, dan sumber daya, Penyelenggaraannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota (Pallewa 2017: 181).

Pelaksanaan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas pariwisata untuk mengembangkan pariwisata kawasan pantai panjang yaitu: membangun pusat keliner, Membangun Musolah, Menata pedagang kaki lima, melakukan Mentoring Terkait Tentang Regulasi atau Dokumen-Dokumen yang harus dipenuhi berkenaan dengan Izin Usaha, Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Terkait Kebersihan Lingkungan Pantai Panjang, Melakukan Mentoring dan Evaluasi Terhadap Pedagang Kaki Lima, Mengusulkan Even-Even Besar dilokasi Pantai panjang, yang mana itu merupakan salah satu penunjang daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke pantai panjang. (www.bengkuluekspres.com). Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan pantai panjang kota Bengkulu. Carl friedrich yang dikutip oleh Agustino (2006:7) bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusul agar berguna dalam mengatasi masalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Abidin dalam kutipan Rizal (2004:09) kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, dalam bentuk Undang-Undang, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan, yang dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (Wahab 1997:55).

Menurut Nugroho Implementasi Kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya sesuai target yang telah diputuskan

sebelumnya. Terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. (Wiratama: 2017:4)

Sedangkan, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabateir dalam wiratama menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah untuk memahami apa yang sebenarnya yang terjadi setelah berlaku atau dirumuskannya sebuah program. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat pada kejadian-kejadiannya.

Setiap kebijakan publik membutuhkan model implementasi kebijakan yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah publik, baik itu diimplementasikan secara *top-down* maupun secara *bottop-up*. Hal tersebut tergantung apa dan bagaimana masalah publik yang akan diselesaikan. namun menurut Riant Nugroho berpendapat jika kombinasi implementasi kebijakan akan berdampak lebih efektif karena implementasi kebijakan tersebut bersifat partisipatif karena dilakukan secara *top-down* dan *bottop-up*.

Kebijakan dalam konteks pengembangan pariwisata dapat diartikan bagaimana pariwisata bagaimana pelaksanaan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun berkelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dengan dimensi sosial budaya, alam dan ilmu dapat berjalan sesuai harapan yang melakukan perjalan. Seseorang dapat melakukan perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang di perlukan yaitu: (1) harus bersifat sementara. (2) harus bersifat sukarela, dalam arti tidak ada unsure paksaan, dan (3) tidak berkerja yang sifatnya menghasilkan upah atau bayaran.

Marpaung dalam Nurhusainita (2017:18) menyatakan bahwa hal yang diperhatikan dalam pengembangan suatu daya tarik wisata yang pontensial harus dilakukan penelitian, inventarisasi dan evaluasi sebelum fasilitas wisata dikembangkan. Hal ini penting agar perkembangan daya tarik wisata yang ada dapat sesuai dengan keinginan pasar potensial dan untuk menentukan pengembangan yang tepat dan sesuai.

Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsure penting dalam dunia kepariwisataan. Dimana objek dan daya tarik wisata dapat menyukkseskan program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai asset yang dapat dijual kepada wisatawan.

Objek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup, dan sebagainya yang memiliki daya tarik dan nilai jual untuk dikunjungi ataupun dinikmati oleh wisatawan. Dalam arti luas, apa saja yang mempunyai daya tarik wisata atau menarik wisatawan dapat disebut sebagai objek dan daya tarik wisata.

Menjadikan propinsi Bengkulu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, maka perlu adanya keterpaduan analisa, strategi, dan kebijakan kepariwisataan yang dapat menjadi rujukan, pedoman, arah pembangunan pariwisata secara jangka panjang. Dinas pariwisata kota Bengkulu melakukan FGD review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Dearah (RIPPDA) dan draft Perda tahun 2017. ([www.Radar Bengkulu](http://www.RadarBengkulu.com)).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2011: 36) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu sekelompok manusia, objek, kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Data Primer, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Sekunder, data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu gambaran umum mengenai objek wisata pantai panjang, foto-foto dokumentasi, dan data-data terkait informan pantai pelaksana/disposisi. Teori van meter dan van horn di nilai dapat menganalisa pelaksanaan kebijakan kepariwisataan di kota Bengkulu karena indikator yang lebih luas dan mencakup segala aspek kebijakan kepariwisataan kota Bengkulu.

Teknik pengumpulan data yakni, 1) wawancara yang bersumber dari percakapan kepada seseorang yang berharap mendapatkan informasi dari informan, seseorang yang diasumsikan yang mempunyai informasi penting tentang suatu objek; 2) Observasi teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung, dengan menggunakan alat indera pendengaran, dan penglihatan terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi; 3) Dokumentasi, dokumen diperoleh dari dinas pariwisata kota Bengkulu, serta dokumen lainnya berupa peraturan dan kebijakan terkait transkrip wawancara, dan foto-foto dokumentasi terkait objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksisting Objek Penelitian

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Provinsi Bengkulu yang memiliki luas 151.7 KM². Kota Bengkulu terletak di posisi Barat Pulau Sumatera berada diantara 30 45" – 30 59" Lintang Selatan serta 102022" Bujur Timur. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang , terdiri dari daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil. Kota Bengkulu di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu adalah Masyarakat Kota Bengkulu yang berbudaya dan bermartabat menuju bangkitnya ekonomi kreatif. Sedangkan Misi sebagai berikut :

- Pembinaan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai luhur, moral dan kearifan local
- Melestarikan dan mengembangkan seni budaya sebagai sarana pengembangan pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif
- Melestarikan peninggalan sejarah kepurbakalaan
- Organisasi pemerintahan dan mekanisme operasional yang kreatif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pengembangan kebudayaan.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas dan membagi suatu kegiatan organisasi yang besar menjadi lebih kecil maka organisasi dibagi berbagai bidang kegiatan dan sub bagian. Struktur suatu instansi sangatlah penting hal ini dimaksudkan agar adanya jelasan pembagian kewenangan

sehingga instansi tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Struktur organisasi Dinas Pariwisata kota Bengkulu diatur berdasarkan Peraturan Daerah No.07 Tahun 2016 Kota Bengkulu.

Dari hasil wawancara di Dinas Pariwisata kota Bengkulu dan observasi ada 4 Fasilitas Publik yang sudah selesai dalam proses pembangunannya yakni Penambahan nama Pantai Panjang di pusat Pantai, Jogging Track, Taman Berkas dan Tempat Pusat kuliner.

- a. Plakat Ikon Nama Pantai Panjang Pembangunan palakat nama ini merupakan usulan dari wakil gubernur Bengkulu Sultan B. Najamudin pada tahun 2013. Dibangun mulai Tahun 2014 dengan lebar yang mencapai 30 meter dan tinggi tiang 3 meter. Kini plakat nama tersebut menjadi ikon dari Pantai Panjang Bengkulu.
- b. *Jogging Track* *Jogging track* merupakan fasilitas yang dibuat pada era Gubernur Agusrin M. Najamudin . sempat terhenti pembangunannya karena kasus korupsi, kini fasilitas tersebut sudah selesai pembangunannya dan dapat dirasakan orang masyarakat Bengkulu.
- c. Taman Berkas Taman Berkas merupakan taman yang dibangun oleh pemerintah kota Bengkulu pada Tahun 2017 dan diresmikan pada 12 Desember 2017 sebagai Ruang Terbuka Hijau di Bengkulu. Hal tersebut diharapkan dapat menambah wisatawan yang mengunjungi Pantai Panjang kota Bengkulu dan targetnya adalah wisatawan mancanegara.
- d. Tempat Pusat kuliner Pusat tempat kuliner ini juga dibangun oleh Pemerintah kota Bengkulu pada bulan Januari 2018. Dari observasi peneliti pembangunan fasilitas tersebut sudah selesai dan mulai di gunakan. Menurut informasi Kasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kawasan Strategis Dan Destinasi bapak Amiruddin Z tempat tersebut akan di gunakan sebagai pusat jajanan dan semua pedagang di Pantai Panjang akan ditempatkan di daerah tersebut.

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu

Kebijakan pengembangan tersebut adalah berupa pengembangan fasilitas publik yang ada di pantai panjang serta mengatur tata kelola pariwisata dengan registrasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan rekomendasi sewa

lahan, dengan ada pendataan tersebut dapat diharapkan para pelaku usaha tidak melanggar peraturan yang ada sehingga tidak mengganggu pengembangan pariwisata kedepannya. Berdasarkan Teori Van Horn dan Van Metter ada 5 indikator yang dapat mengukur pelaksanaan suatu kebijakan.

Standar dan Sasaran Kebijakan. Sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik apabila ada standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaannya. Standar operasional prosedur dalam kebijakan adalah sebagai pedoman yang mengatur pelaksanaannya dan sasaran sebagai tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan kebijakan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata kota Bengkulu standar dan sasaran kebijakan sudah dikelola dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa sasaran kebijakan Pengelolaan pariwisata khususnya Pantai Panjang kota Bengkulu adalah pedagang yang ada di daerah pariwisata Kawasan pantai Panjang kota Bengkulu. Dan untuk standar dan prosedur pelayanan yang ada yakni Pelayanan Sewa Lahan dan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata sudah dijalankan dengan baik oleh Dinas Pariwisata kota Bengkulu berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2016 kota Bengkulu.

Sumber daya dalam kebijakan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial, kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan publik yakni : 1) Sumber daya Manusia. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kebijakan pariwisata Kota Bengkulu tepatnya di daerah Kawasan wisata pantai Panjang Kota Bengkulu sumber daya manusia yang ada sudah bisa menjalankan kebijakan yang namun masih terdapat kendala. Data penunjang lainnya adalah hasil Observasi peneliti mengenai SOP Pengelolaan Pantai Panjang yang dilampirkan pada penelitian ini yang mana menunjukkan bahwa petugas diharuskan turun untuk memantau lokasi di Pantai Panjang Kota Bengkulu; 2) Sumber daya Finansial. Selain sumber daya manusia sumber daya finansial juga menentukan dalam kebijakan pengelolaan pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. Sumber daya finansial tersebut dapat di teruskan untuk membentuk sarana dan prasarana guna membentuk tempat wisata yang lebih baik.

Dari pemaparan data-data di atas menunjukkan bahwa untuk sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sudah mencukupi dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ada, akan tetapi untuk kualifikasi kualitas sumber daya manusia yang ada perlu penelitian lebih lanjut seperti kinerja pegawai. Untuk sumber daya finansial Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pun selalu membenahi objek wisata Pantai Panjang dengan menambah sarana dan prasana yang ada didukung tambahan finansial dari BUMN yang ada di Bengkulu.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan hubungan antar lembaga pemerintahan sangat diperlukan hubungan tersebut berupa komunikasi dan kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah. Dalam kebijakan pengelolaan pariwisata kawasan pantai panjang Dinas Pariwisata Kota Bengkulu juga selalu menjaga hubungan kerjasama dengan berbagai organisasi perangkat daerah lainnya.



Gambar 4.1
Kondisi Pariwisata Kota Bengkulu

Gambar tersebut menunjukkan pihak-pihak yang ikut serta dalam pengembangan pantai panjang yakni Bank Indonesia, Genbi dan PLN peduli. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa, hubungan antar organisasi dalam pengelolaan kawasan wisata Pantai Panjang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi yang ada berjalan dengan baik tidak ada penumpukan tugas dalam kebijakan tersebut karena sudah ada peraturan yang mengurus Tugas Pokok dan Fungsi di setiap Organisasi Perangkat Daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 56 kota Bengkulu. Walaupun begitu koordinasi perlu

ditingkat lagi karena masalah kebersihan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Di sisi lain, peran lingkungan eksternal juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, lingkungan eksternal itu adalah kondisi ekonomi, sosial dan politik. Sebuah kebijakan akan berjalan dengan lancar apabila keadaan politiknya stabil dan masyarakat didalamnya mendukung kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pariwisata Kawasan Pantai Panjang ini sudah didukung oleh semua aspek baik pemerintahan ataupun masyarakatnya.

Data di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan khususnya dalam hal pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang sudah didukung penuh oleh pemerintah maupun masyarakat Bengkulu hal tersebut sudah diatur dalam Perda No.06 Tahun 2016 Kota Bengkulu. Dalam rangka menyambut *wonderfull* Bengkulu 2020 maka pengembangan di Kawasan Objek wisata Pantai Panjang terus dibenahi agar terus mendapat anime masyarakat.

Sikap para pelaksana sangat di perlukan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, kejujuran, keramahan dan pelayanan yang diberikan haruslah maksimal. Dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pariwisata Kawasan Objek Wisata Pantai Panjang para agen pelaksana yang ada sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik.

Sikap dan kejujuran petugas selaku pelaksana kebijakan pengelolaan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang sudah baik dengan motto "Kami Siap Melayani Anda Dengan Prima Dan Transparan" yang dijunjung dengan baik. Tidak ada pungutan liar dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan Perda nomor 06 Tahun 2016 kota Bengkulu.

Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut berupa tata kelola wilayah pantai dan kebersihan lingkungan daerah pariwisata. Masalah kebersihan, pemeliharaan fasilitas publik dan tata kelola daerah wisata Pantai Panjang yang menjadi prioritas untuk menjadi perhatian semua pihak.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu sasaran dan standar kebijakan haruslah jelas, karena ke dua (2)

hal tersebut merupakan tujuan dan alur suatu kebijakan agar tidak keluar dari apa yang telah direncanakan. Standar dan sasaran merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik berwujud maupun tidak, jangka Pendek, menengah atau sebagai batasan dan fokus agar tujuan dan sasaran yang dicapai. Menurut Van Meter dan Van Horn standar dan sasaran kebijakan menentukan kinerja suatu kebijakan. Kinerja yang dimaksud adalah menilai sejauh mana standar dan sasaran kebijakan direalisasikan.

Dari hasil pengumpulan data yang peneliti lakukan di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dan kawasan wisata Pantai Panjang, ada dua (2) jenis standar kebijakan yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu yakni berupa Standar dan Prosedur pelayanan dalam Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sewa lahan di Daerah Pariwisata. Hal tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata NO.PM 88/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Pariwisata Dan Perda Nomor 06 Tahun 2016 kota Bengkulu Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah.

Sasaran kebijakan ini adalah masyarakat yang melakukan usaha di daerah Wisata kota Bengkulu. Hal tersebut sesuai Pasal 07 Perda Nomor 06 Tahun 2016 Kota Bengkulu Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah. Semua pelaksanaan standar dan sasaran sudah dilakukan dan sesuai dengan kebijakan yang ada. semua kegiatan usaha dan pariwisata sudah terdaftar dan dikelola dengan baik oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata ada beberapa unsur yang sebaiknya menjadi perhatian pihak pelaksana kebijakan sebagai berikut :

- a. Sumber daya. Selain standar dan sasaran kebijakan, yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Menurut Van Meter dan Van Horn sumber-sumber yang dimaksud tersebut mencakup dana yang mendorong dan melancarkan pelaksanaan kebijakan yang efektif serta sumber daya manusia yang akan melaksanakan tujuan kebijakan. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata sudah mencukupi dalam pelaksanaannya, untuk pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

pelayanan yang berikan petugas sudah baik. Akan tetapi untuk menilai kinerja lebih lengkap untuk pegawai di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu perlu penelitian lebih lanjut yang terfokus pada kinerja pegawai. Dalam sumber daya finansialnya anggaran yang ada sudah memadai karena hal tersebut di karenakan Provinsi Bengkulu akan Menyambut *Wonderfull Bengkulu 2020* dan untuk selanjutnya pengelolaan pantai panjang berada sepenuhnya kewenangan pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki anggaran lebih besar. Selain itu bantuan dari Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang ada di Bengkulu pun ikut membantu dalam pelaksanaannya sehingga dalam hal finansial belum ditemukan kekurangan.

- b. Hubungan Antar Organisasi. Pelaksanaan suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila terjalin komunikasi yang baik antar *Stakeholder* yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Menurut Van Meter dan Van Horn komunikasi yang dimaksud adalah adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program kebijakan. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu komunikasi yang terjalin sudah baik walau sedikit lempar tangkap tugas. Komunikasi yang berhubungan dengan pelayanan kebijakan Dinas Pariwisata kota Bengkulu Berkerja sama Dengan DPMPSTP Kota Bengkulu dalam pemberian izin TDUP(Tanda Daftar Usaha Pariwisata). Selain itu dalam pengelolaan Pantai Panjang Dinas Pariwisata Kota Bengkulu berkerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perhubungan. Komunikasi yang terjalin sudah cukup seperti adanya pihak-pihak terkait di daerah pariwisata. Perlu adanya komunikasi yang lebih baik lagi antar *Stakeholder* yang ada sangkutannya terhadap kebijakan tersebut kekurangan yang terasa yakni dalam pihak kebersihan yang mana Dinas Pariwisata Kota Bengkulu menunjukan hal tersebut kepada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dikarenakan sudah ada Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang Dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016.
- c. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Kondisi lingkungan eksternal sangat penting untuk menentukan suatu kebijakan bisa berjalan lancar atau tidak. Dukungan dari masyarakat dan pemerintahan sangat penting, apabila

keadaan sosial dan politik dimasyarakat tidak stabil maka pelaksanaan suatu kebijakan pun dapat terhambat. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu sudah didukung oleh pemerintah baik Pemerintah kota maupun provinsi. Semua hal tersebut sudah diatur dalam Perda No.06 Tahun 2016 Kota Bengkulu yang mana disana terus mengembangkan investor untuk ikut serta dalam pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang. Terlebih lagi dalam rangka menyambut wonderful Bengkulu 2020 masyarakat khususnya pelaku usaha di Pantai panjang sudah siap menerima kebijakan yang akan dibuat pemerintah asalkan tidak merugikan pelaku usaha di Kawasan wisata tersebut. Walaupun masih ada beberapa masyarakat yang kurang menyadari untuk menjaga fasilitas dan keindahan lingkungan Pantai Panjang.

- d. Disposisi (Sikap Para Pelaksana Kebijakan). Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan banyak mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan Publik. Hal tersebut dapat terjadi, apabila kebijakan tersebut bukan hasil formulasi dari kebijakan warga di daerah tersebut. Pengetahuan pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sangat diperlukan. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Dinas Pariwisata sikap dan kejujuran petugas selaku pelaksana kebijakan pengelolaan Kawasan Objek Wisata Pantai Panjang sudah baik dengan motto "*Kami Siap Melayani Anda Dengan Prima Dan Transparan*" yang dijunjung dengan baik. Pelaksanaan yang dilakukan pun sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh kebijakan. Tidak ada pungutan liar dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan Perda Nomor 06 Tahun 2016 Kota Bengkulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dan Kawasan Objek Wisata Pantai Panjang Dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sasaran Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu adalah pelaku usaha yang ada di daerah wisata tersebut dan Standar kebijakan yang ada sudah sesuai Perda No. 06 Tahun 2016. Sumber

daya yang ada sudah memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial sehingga Pantai Panjang dapat dikembangkan dengan membangun fasilitas-fasilitas publik seperti: Masjid, tempat pusat kuliner, taman Berkas dan Sarana Kebersihan Pantai. Komunikasi antar *Stakeholder* sudah sesuai peraturan yang ada namun perlu ditingkatkan koordinasi mengenai tugas antar lembaga. Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu sudah di dukung baik pemerintah maupun sasaran kebijakan tersebut akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang kurang menyadari dalam menjaga daerah pariwisata pantai Panjang tersebut. Sikap pelaksana kebijakan sudah baik dengan adanya motto "*Kami Siap Melayani Anda Dengan Prima Dan Transparan*".

2. Kendala yang dihadapi kebijakan ini adalah masalah kebersihan dan sudah banyak fasilitas publik yang sudah rusak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik dan koordinasi antar *stakeholder* terkait, serta belum ada sanksi yang jelas bagi pelanggar kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancar Siwah.
- Agustina Pallewa. 2017. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*. Toraja Utara: Universitas tadulako.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anwar, Faizal. 2015, *Analisis Kebijakan Publik*, Diktat Kuliah FISIPOL Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- Anggra, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia: Bandung
- Arenawati. 2014, *Adimistrasi Pemerintahan Daerah*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Darmi, Titi. 2017. Capacity Building Resource Management of Coastal Areas To Improve the Local Economic Based by Cross-Cutting Partnerships : Case Study on Panjang Beach Bengkulu City. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1-12.
- Dunn, William N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press :Yogyakarta

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan publik berbasis Dynamic Policy Analisis*, Gava Media: Yogyakarta
- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta, CV.Gramedia.
- Junaidi, Ardi Alfatih, dkk. 2011. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata*. Sumarta Selatan: Universitas Sriwijaya.
- Leo Agustino. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Melda Yuli Haryani. 2007. *Startegi Pengembangan Jasa Pariwisata*. Bengkulu.
- Nugroho, Riant. 2004. *kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT
- Oka A. Yoety. 1995. *Ciri-ciri Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Pendit. 2002. *Bentuk-Bentuk Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab. 2006. "The Policy Implementasi process conceptual framework" *administration And Society*.
- Siti Zahara. (2009). *Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Obyek Wisata Pantai Panjang dan Tapak Badri di Kota Bengkulu*.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurhusainita. 2017. *Starategi Pengembangan Wisata*. Lampung: Universitas lampung.